

**EVALUASI PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) DALAM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI
JAMBI**

Alif Dzaki Kholillah Zeber

NPP.30. 0288

Asdaf Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: kholillah.zeber13@gmail .com

Pembimbing Skripsi: Rina Wahyuni, S.Kom, M.T.I

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The author focuses on Evaluation of the Utilization of the implementation of services related to information systems in digital-based government in the form of an application called the Regional Government Information System (SIPD). ***Purpose:*** The purpose of this study is to evaluate the use of the SIPD application in improving public services and facilitating all planning and budgeting matters in Sungaipuh City. ***Method:*** The method used in this research is inductive qualitative by using inductive data analysis. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. ***Results/Findings:*** Based on the results of the author's research, that optimization has actually been carried out well but has not run optimally because there are still many deficiencies found, including a lack of socialization, the role of experts who are felt to be lacking, and a lack of facilities that support the performance of the SIPD application. ***Conclusion:*** Utilization of the shrimp application is not optimal due to several factors, namely the lack of socialization and training by the central government for experts. The role of experts who are felt to be lacking in carrying out the SIPD application, so that further training is needed for experts. As well as in increasing efficiency, adequate facilities such as special computers and a good network are needed in operating applications.

Keywords: Evaluation; Information Systems; SIPD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada Evaluasi Pemanfaatan penyelenggaraan pelayanan yang berhubungan dengan sistem informasi pada pemerintahan berbasis digital berbentuk aplikasi yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemanfaatan aplikasi SIPD dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah semua urusan perencanaan dan penganggaran di Kota Sungai Penuh. **Metode:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah induktif kualitatif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa optimalisasi sebenarnya sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyak ditemukan kekurangan, diantaranya kurangnya sosialisasi, peran tenaga ahli yang dirasa masih kurang, serta kurangnya fasilitas yang mendukung kinerja aplikasi SIPD. **Kesimpulan:** Pemanfaatan aplikasi udajang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintahan pusat kepada tenaga ahli. Peran tenaga ahli yang dirasa masih kurang dalam menjalankan aplikasi SIPD, sehingga perlunya diadakan pelatihan lebih lanjut kepada tenaga ahli. Serta dalam meningkatkan efisiensi diperlukannya fasilitas yang memadai seperti komputer khusus dan jaringan yang baik dalam pengoperasian aplikasi.

Kata Kunci: Evaluasi; Sistem Informasi; Aplikasi SIPD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan dan hak masyarakat, harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dalam halnya menyelenggarakan pelayanan publik masih belum sempurna. Banyaknya masalah-masalah yang ditemui di lapangan seperti proses pelayanan yang memakan waktu yang sangat lama serta banyaknya rangkaian tahapan-tahapan yang harus dilalui masyarakat dianggap tidak efektif. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukannya inovasi baru terhadap sistem pelayanan publik pada pemerintahan

Kehidupan pada era-sekarang ini semua tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, umumnya pada semua sektor sudah menggunakan teknologi, dari yang biasanya melakukan sesuatu dengan memakai alat yang terbilang jadul kini menggunakan bermacam cara seperti robot dan lainnya. Begitu pula pada zona pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah, dengan adanya perkembangan yang dirasakan pada bidang teknologi tersebut dapat melahirkan model pelayanan yang berbasis web dan aplikasi yang merupakan langkah yang sangat strategis. Namun dalam penerapannya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan berbagai cara dalam menggapai suatu proses tersebut (Bella Husada 2019).

Di Indonesia pelayanan publik merupakan hak dari seluruh rakyat Indonesia, pada era sekarang ini yang semua berbasis teknologi tersebut maka pemerintah Indonesia menciptakan pelayanan publik tersebut dengan berbasis digital, penggunaannya tak luput dari jaringan internet di Indonesia. Dari data yang diperoleh di atas pada tahun 2022 jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 277.7 juta pengguna dan mengalami kenaikan

jumlah pengguna lebih banyak 25 juta dibandingkan tahun lalu atau diperkirakan naik 2,8 Juta atau 1,0% dari tahun sebelumnya (Andi DwiRiyanto, 2022).

Dengan adanya Undang-Undang Indonesia No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional harus disusun secara terstruktur, tertata, terintegritas, inklusif, dan responsive terhadap perubahan. Adapun perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi secara dinamis untuk mengatasi hal tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sungai Penuh dalam mengelola perencanaan pembangunan yang terjadi di Kota Sungai Penuh ikut serta dalam menggunakan teknologi informasi guna mendukung kinerja yang dilaksanakan. Untuk memenuhi tugas yang dimiliki tersebut dibutuhkan salah satunya teknologi dimana perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan pengawasan sehingga anggaran dan perencanaan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan sejajar dengan sistem yang telah diajukan tersebut.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kota Sungai Penuh telah digunakan oleh BAPPEDA Kota Sungai Penuh sejak tahun 2013 dengan harapan dengan dibentuknya SIPD mampu mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sehingga dalam upaya perencanaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, SIPD merupakan alat yang sangat penting bagi BAPPEDA Kota Sungai Penuh dalam mengelola dan mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan kota. Hal demikian dinilai tidak efektif dan efisien sebab data yang di input memakan waktu yang banyak, kemudian data yang diinput dapat berubah jika terjadi penghitungan yang tidak akurat dalam memasukan data dan pengelolaan data yang rumit membuat tim yang ditugaskan untuk menginput data menjadi kewalahan, hal ini tentu saja berdampak fatal bagi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk menghindari hal tersebut Kementerian Dalam Negeri membentuk aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi SIPD telah mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem Penganggaran belanja daerah dengan tujuan dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Akan tetapi masalah yang ditemukan yaitu belum terlaksananya efisiensi secara optimal pelaksanaan aplikasi SIPD ini sehingga dibutuhkan evaluasi dan pembaharuan terhadap aplikasi dan tenaga kerja operator pengguna aplikasi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan evaluasi pemanfaatan aplikasi SIPD aplikasi SIPD. Adapun masalah yang ada dalam pelaksanaan aplikasi SIPD di Kota Sungai Penuh yaitu kurangnya Sumberdaya yang memenuhi baik Sumber daya manusia maupun fasilitas yang kurang baik, selain itu dari segi aplikasi yang kurang sederhana dan dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SIPD lebih rumit dari aplikasi yang biasa digunakan sebelumnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan masukan dan bahan penelitian yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

NO	JUDUL	PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO	1. Afrilia Bella Karundeng 2. Johannis E. Kaawoan 3. Sofia E. Pangemanan	1. Membahas tentang pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 2. penelitian berfokus pada pemanfaatan aplikasi SIPD	Perbedaan terletak pada tahun pelaksanaan penelitian dan juga daerah pelaksanaannya di lakukan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
2.	EFAEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Mahatir Muhammad Iqbal 2. Sri Handayani 3. Dewi Istanti Safitri	1. Sama-sama menganalisis pengaruh positif dalam perencanaan pembangunan daerah 2. meneliti tentang SIPD	1. Perbedaan terletak pada tahun pelaksanaan penelitian dan daerah pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malang 2. terdapat fitur catatan harian pada aplikasi yang diteliti.
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN	1. Lusi Adriani	1. sama sama menggunakan metode kualitatif. dan	1. Perbedaan terletak pada tahun pelaksanaan penelitian dan juga daerah
	PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA DUMAI (STUDI KASUS PADA APLIKASI E PLANNING		kuantitatif 1. meneliti SIPD	1. pelaksanaannya di lakukan di Kota Dumai 2. Penelitian berfokus pada salah satu fitur dari aplikasi SIPD

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu pelayanan sistem informasi pemerintahan melalui aplikasi SIPD yang mana dapat membuat pelayanan informasi publik dan data informasi yang diperlukan menjadi lebih efisien, efektif, dan fleksibel. Kemudian untuk lokus penelitian yang berada di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, indikator/dimensi yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Suharsimi Arikunto (2003) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan. Evaluasi dapat menunjukkan suatu keberhasilan kinerja atau program yang berjalan dengan suatu penilaian, jika kegiatan yang dievaluasikan telah memenuhi sasaran atau telah mencapai tujuan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil dan jika perlu proses evaluasi juga mampu mendorong kegiatan yang berjalan dengan baik menjadi kegiatan yang lebih inovatif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau, menganalisa, dan memperoleh gambaran jelas mengenai penyelenggaraan pelayanan Sistem Informasi berbasis digital berbentuk aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Udajang dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Sungai Penuh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan penggunaan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang informan yang terdiri atas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Sungai Penuh, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Sungai Penuh, Kepala Bidang Anggaran Kota Sungai Penuh, Operator SIPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Sungai Penuh dan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori dari Stufflebeam (1965) dimana terdapat empat kategori untuk melakukan evaluasi yaitu evaluasi context, input, proses, dan product (CIPP). CIPP merupakan model yang dapat digunakan untuk menilai suatu sistem informasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam (1965).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemanfaatan SIPD di Kota Sungai Penuh

SIPD atau Sistem Informasi Perizinan Daerah adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan memproses perizinan usaha di suatu daerah. Kota Sungai Penuh merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan SIPD untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha. Dalam pemanfaatan SIPD di Kota Sungai Penuh, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti efektivitas waktu, transparansi, dan kemudahan akses.

Keuntungan pertama dari pemanfaatan SIPD di Kota Sungai Penuh adalah efektivitas waktu dalam pengurusan perizinan usaha. Dengan menggunakan SIPD, pemohon perizinan dapat mengajukan permohonan secara online dan melakukan pembayaran secara elektronik, sehingga mempercepat proses pengurusan perizinan dan mengurangi waktu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, SIPD juga memungkinkan pemohon perizinan untuk memantau status pengajuan perizinan secara real-time dan memberikan notifikasi secara otomatis mengenai perkembangan permohonan.

Keuntungan kedua dari pemanfaatan SIPD di Kota Sungai Penuh adalah transparansi dalam pengurusan perizinan usaha. Dalam penggunaan SIPD, masyarakat dapat memantau secara langsung proses pengurusan perizinan usaha yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dengan begitu, masyarakat dapat memastikan bahwa proses pengurusan perizinan usaha dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keuntungan ketiga dari pemanfaatan SIPD di Kota Sungai Penuh adalah kemudahan akses. Dalam penggunaan SIPD, masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan usaha kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pihak berwenang. Hal ini dapat memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari kantor pihak berwenang atau memiliki kesibukan yang tinggi dalam pengajuan permohonan perizinan usaha.

3.2 Hambatan yang berpengaruh terhadap keberhasilan Sistem Informasi Perencanaan (Pemerintahan) Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Sungai Penuh

Beberapa hambatan yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan Sistem Informasi Perencanaan (Pemerintahan) Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Sungai Penuh antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran: Implementasi SIPD memerlukan anggaran yang cukup besar untuk infrastruktur, hardware, software, pelatihan, dan dukungan teknis. Keterbatasan anggaran dapat menghambat kemampuan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk membeli dan mempertahankan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Peningkatan keterampilan dan kemampuan staf pemerintah dalam mengelola sistem informasi yang kompleks merupakan tantangan yang signifikan. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dapat menghambat implementasi SIPD dan dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi.
3. Ketidaksesuaian antara Sistem Informasi dan Proses Bisnis: Sistem informasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan bisnis dan proses operasional yang ada, sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ketidaksesuaian antara sistem informasi dan proses bisnis dapat menghambat penggunaan sistem informasi secara efektif dan efisien.

4. Kurangnya Keterlibatan Pihak-Pihak yang Terkait: Dibutuhkan kerjasama yang erat antara Pemerintah Kota Sungai Penuh, pihak-pihak terkait dan masyarakat untuk mengimplementasikan SIPD dengan sukses. Kurangnya keterlibatan pihak-pihak terkait dapat menghambat keberhasilan implementasi SIPD.

Masalah Keamanan Informasi yang dihadapi berupa, Keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi informasi penting dan rahasia dari akses yang tidak sah. Keamanan informasi yang lemah dapat membahayakan integritas sistem informasi dan dapat menghambat keberhasilan implementasi SIPD.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Untuk Mengurangi Hambatan Hambatan Dalam Pemanfaatan SIPD Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran di Kota Sungai Penuh

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi hambatan dalam pemanfaatan SIPD terhadap sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di kota tersebut. Beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Pelatihan dan pendampingan: Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh SKPD yang terlibat dalam penggunaan SIPD. Hal ini dilakukan agar seluruh SKPD dapat memahami dan menguasai sistem dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran.

Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan pelatihan dan pendampingan ini, diharapkan seluruh SKPD dapat memahami fungsi dan manfaat SIPD dengan lebih baik, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Sungai Penuh.

Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan metode yang beragam, mulai dari pelatihan tatap muka hingga pelatihan online. Dalam pelatihan, seluruh SKPD diberikan penjelasan mengenai fungsi dan cara penggunaan SIPD serta diberikan contoh-contoh penggunaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sementara itu, pendampingan dilakukan secara langsung oleh tim teknis yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh SKPD dapat mengaplikasikan penggunaan SIPD dengan benar.

Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menyediakan modul-modul dan petunjuk penggunaan SIPD yang dapat diakses oleh seluruh SKPD. Dengan adanya modul-modul dan petunjuk penggunaan ini, SKPD dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai penggunaan SIPD.

Dengan pelatihan, pendampingan, serta modul-modul dan petunjuk penggunaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, diharapkan hambatan-hambatan dalam pemanfaatan SIPD dapat diatasi sehingga sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dapat tercapai dengan lebih baik di Kota Sungai Penuh.

2. Membuat regulasi: Pemerintah Kota Sungai Penuh telah membuat regulasi terkait dengan penggunaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran. Regulasi ini dibuat untuk mengatur dan memastikan bahwa penggunaan SIPD dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh terkait dengan penggunaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan SIPD dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat membantu dalam sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di Kota Sungai Penuh.

Regulasi ini meliputi aturan-aturan yang berkaitan dengan penggunaan SIPD, seperti tata cara pengisian data, mekanisme pengolahan data, dan tata cara pelaporan. Regulasi ini juga mencakup tata cara pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan SIPD, sehingga pemanfaatan SIPD dapat dilakukan secara tepat waktu dan terukur.

Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan SIPD kepada seluruh stakeholder terkait, baik itu pimpinan SKPD maupun staf yang terlibat langsung dalam penggunaan SIPD. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penggunaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga pemanfaatan SIPD dapat dilakukan dengan lebih efektif dan optimal.

Dengan adanya regulasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, diharapkan penggunaan SIPD dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan teratur, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di Kota Sungai Penuh.

3. **Koordinasi antar SKPD:** Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melakukan koordinasi antar-SKPD untuk memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dapat tercapai dengan baik. Hal ini dilakukan agar seluruh SKPD dapat bekerja sama dalam penggunaan SIPD dan menghindari adanya perbedaan data yang dapat mengganggu sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Koordinasi antar SKPD menjadi salah satu upaya yang penting untuk dilakukan dalam mengurangi hambatan dalam pemanfaatan SIPD terhadap sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di Kota Sungai Penuh. Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap dapat memastikan bahwa seluruh SKPD dapat berkerjasama dalam penggunaan SIPD dan menghindari adanya perbedaan data yang dapat mengganggu sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat-rapat antar SKPD secara rutin. Dalam rapat-rapat ini, seluruh SKPD berkesempatan untuk memaparkan rencana dan program kerja yang akan dilaksanakan serta melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa program tersebut dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan.

Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menggunakan platform online untuk memudahkan koordinasi antar-SKPD, seperti melalui email atau aplikasi chat. Dengan menggunakan platform online ini, SKPD dapat saling berbagi informasi dan memastikan bahwa seluruh data yang diinput ke dalam SIPD sama-sama akurat dan sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mendorong adanya pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh SKPD mengenai penggunaan SIPD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh SKPD mengenai manfaat dan pentingnya penggunaan SIPD dalam memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Dalam melakukan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan transparansi dalam berbagi informasi. Hal ini penting dilakukan agar setiap SKPD dapat saling memahami dan memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dapat diperoleh dengan mudah dan akurat.

4. Peningkatan kualitas data: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas data yang diinput ke dalam SIPD. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh sistem dapat lebih akurat dan dapat dipercaya dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Harapannya hambatan-hambatan dalam pemanfaatan SIPD terhadap sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dapat dikurangi dan proses perencanaan dan penganggaran di Kota Sungai Penuh dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penggunaan aplikasi SIPD memberikan banyak dampak positif di pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Sungai Penuh. Aplikasi SIPD membuat sistem informasi yang saling sinkron antar Organisasi Pemerintahan Daerah yang terhubung langsung dengan sistem informasi pusat, sehingga dalam pemantauannya lebih transparan.

SIPD di Kota Sungai Penuh merupakan salah satu bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2013 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, yang dikembangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 yaitu membahas tentang pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE). Penulis menemukan temuan penting yakni penggunaan aplikasi SIPD sudah berjalan dengan cukup baik sebagai sarana penyedia informasi layanan publik. Sama halnya dengan temuan Afrilia Bella Karundeng bahwa keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro telah meningkat terbukti dengan didapatkannya predikat “Menuju Informatif” pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 sudah mendapatkan predikat “Informatif”. Begitupun dengan temuan Novi Anggraeni dan Hanny Purnamasari bahwa dengan diberlansungkannya penerapan E-Government dalam pelayanan publik dapat melahirkan pemerintahan yang berdaya guna dan bermanfaat bagi pemerintahan dan masyarakat.

Layaknya aplikasi pemerintah lainnya, aplikasi SIPD juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya masih kurangnya fitur fitur yang dinilai belum sederhana serta kendalafasilitas yang kurang memadai dalam pelaksanaan jalannya aplikasi layaknya temuan Aditya Marcello dkk (Aditya dkk., 2020). Kurangnya sosialisasi sebagai penyebarluasan informasi mengenai aplikasi SIPD juga menjadi masalah berikutnya, layaknya temuan Rofingatun Nur Laila Salmah (Salmah, Rofingatun Nur Laila, 2022)

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan sebuah penemuan dimana masih ada beberapa orang yang masih terhubung dengan perangkat lama SIPD dan bukan termasuk dalam lembaga terkait sehingga diharapkan Aplikasi SIPD dapat meningkatkan fitur keamanan di setiap Perangkat Pemerintahan dan selalu melakukan pembaharuan secara berkala.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi telah terlaksana dengan baik akan tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyak ditemukan kekurangan. Pemanfaatan aplikasi SIPD memiliki Beberapa faktor yang dapat memberikan hambatan terhadap keberhasilan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Sungai Penuh antara lain adanya sistem yang belum sempurna dari pemerintah serta fasilitas yang belum mendukung penuh untuk kinerja sistem yang dijalankan. Untuk meningkatkan SIPD, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan sistem, meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai, meningkatkan kualitas seleksi dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi pegawai, serta meningkatkan tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan SIPD.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu dan biaya penelitian. Dimana penelitian ini hanya memiliki waktu 14 hari dengan 10 hari kerja. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa informan saja sebagai subjek dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Kemajuan teknologi merupakan tuntutan bagi pemerintah dan masyarakat agar mampu menjalankan pemerintahan secara digital (e-government). Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintahan kota Sungai Penuh lebih focus pada pengondisian fasilitas dan melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja serta untuk aplikasi SIPD yang digunakan diharapkan lebih disempurnakan dan disederhanakan dalam mempermudah penggunaan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang ikut serta membantu pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Buku Panduan SIPD Kota Sungai Penuh.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harefa, Mandala, dkk. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrayani, Etin dan Gatiningsih. 2013. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Bandung: IPDN Press.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Asma Lathifa, “*Evaluasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Utara* “. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020
- Afrilia Bella Karundeng “*Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*”. Jurnal, 2021
- <https://repository.unj.ac.id/1757/6/11.%20BAB%20II.pdf>
- <https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/sipd-bagian-integral-dokumen-perencanaan-pembangunan-daerah>
- <http://bappeda.jambikota.go.id/>
- <http://repository.ut.ac.id/4069/1/PKOP4422-M1.pdf>